

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demonstrasi merupakan fenomena yang lazim terjadi pada sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi, termasuk Indonesia (Adhari, 2021: 17). Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui frasa konstitusional tersebutlah, diketahui negara Indonesia bukan hanya negara nomokrasi, melainkan demokrasi.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi politik yang telah hadir sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam konteks modern, demonstrasi menjadi alat penting yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, atau tuntutan terhadap pemerintah atau institusi lainnya. Bentuk demonstrasi dapat beragam, mulai dari unjuk rasa damai hingga aksi protes yang lebih radikal. Menurut Mahardika (2000: 3), gerakan demonstrasi merupakan serangkaian tindakan yang hadir sebagai reaksi atas suatu keadaan atau kondisi di dalam masyarakat.

Pada masa Orde Baru, demonstrasi sering dianggap sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan sering kali ditekan oleh pemerintah. Namun, setelah Reformasi tahun 1998, demonstrasi menjadi lebih terbuka dan menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebagai sebuah gerakan, demonstrasi tentu memiliki makna dan tujuan. Pada 21 Mei 1998 misalnya, demonstrasi yang dilakukan melahirkan 'Reformasi 1998'. Reformasi tersebut menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru Suharto dengan rezim otoriternya yang telah mendarah-daging. Demonstrasi bukan hanya berhasil 'mengganti', melainkan juga 'merombak' dan 'memperbaharui' jalannya pemerintahan melalui 6 (enam) tuntutan reformasi. Tuntutan ini adalah: (1) Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; (3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-kolusi dan

nepotisme; (4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah; (5) Mewujudkan kebebasan pers; dan (6) Mewujudkan kehidupan demokrasi (Adhari, 2021).

Selang 21 tahun pasca demonstrasi Reformasi 1998, mahasiswa kembali mengadakan demonstrasi dengan *hashtag*-nya “Reformasi Dikorupsi” pada tahun 2019 yang mengusung 7 (tujuh) desakan, meliputi: 1) Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, Pertanahan, Pemasarakatan, Ketenagakerjaan, Mendesak pembatalan UU KPK dan SDA, mendesak disahkan RUU PKS dan perlindungan PRT; 2) Batalkan pimpinan KPK bermasalah; 3) Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil; 4) Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tapol Papua segera; 5) Hentikan kriminalisasi aktivis; 6) Hentikan pembakaran hutan dan pidanakan korporasi pembakaran, 7) Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM (Adhari, 2021: 18).

Selain itu, pasca Reformasi 1998, muncul beragam kelompok demonstran yang mulai memperjuangkan berbagai isu sosial dan politik. Ada enam kelompok demonstran yang aktif dalam isu sosial dan politik. Yang pertama adalah Mahasiswa. Menurut Misbah (2017), mahasiswa sering menjadi kekuatan utama dalam sebuah demonstrasi. Sejak dulu, mahasiswa telah terlibat dalam berbagai gerakan politik dan sosial yang mengarah pada perubahan. Dalam sejarah modern Indonesia, peran mahasiswa sangat signifikan dalam memicu reformasi politik, termasuk dalam kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Hal yang sering mahasiswa serukan ialah perubahan terkait harga, biaya pendidikan, kebebasan berpendapat, dan isu politik lainnya. Kedua adalah Serikat Buruh yang juga menjadi salah satu kelompok demonstran yang ikut dalam menyuarakan keresahan dan permasalahan yang mereka alami. Menurut Rachman (2019), para buruh tidak jarang ikut memimpin protes untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, seperti kenaikan upah dan perlindungan tenaga kerja. Ketiga adalah Masyarakat Sipil, yang mana dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi 1998, yang telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyuarakan aspirasi masyarakat yang terpinggirkan. Peran mereka dalam demonstrasi membantu membentuk wacana publik dan memengaruhi arah kebijakan negara. Keempat adalah Kelompok

Agama. Setelah Reformasi 1998 di Indonesia, kelompok agama juga telah menjadi bagian dari kelompok demonstran yang aktif. Mereka sering mengorganisir demonstrasi untuk menyuarakan isu-isu keagamaan dan memperjuangkan hak-hak agama, seperti kebebasan beragama, toleransi antaragama, perlindungan terhadap minoritas agama, dan penegakan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial-politik. Kelompok agama juga turut serta dalam demonstrasi untuk menyuarakan isu-isu keagamaan dan perlindungan terhadap minoritas agama (Wibowo, 2018). Kelima adalah Kelompok Adat yang menjadi kelompok demonstran yang aktif pasca-Reformasi 1998 di Indonesia. Kelompok adat terlibat dalam demonstrasi untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak adat mereka terkait dengan tanah, sumber daya alam, dan kehidupan budaya mereka. Keenam ialah Kelompok Seni dan budayawan. Kelompok ini juga telah menjadi bagian dari kelompok demonstran yang aktif pasca-Reformasi 1998 di Indonesia. Menurut Sukirman (2016), kelompok adat di beberapa daerah juga terlibat dalam protes untuk mengamankan hak-hak adat mereka atas tanah dan sumber daya alam.

Menurut Rukmana (2018), kelompok-kelompok tersebut, baik itu mahasiswa, buruh, kelompok masyarakat sipil, kelompok agama, kelompok masyarakat adat, maupun kelompok seniman dan budayawan, memiliki tujuan yang beragam namun satu visi yang sama, yaitu menciptakan perubahan yang lebih baik dalam sistem sosial dan politik Indonesia untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Setiap kelompok demonstran memiliki cara tersendiri dalam mengorganisir dan merencanakan aksi demonstrasi mereka, yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, nilai-nilai, dan sifat dari masing-masing kelompok tersebut. Mahasiswa, misalnya, sering diorganisir oleh organisasi kemahasiswaan seperti himpunan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, atau lembaga dakwah kampus. Mereka menggunakan berbagai metode komunikasi dan koordinasi, seperti rapat, forum diskusi, grup media sosial, dan saluran komunikasi lainnya untuk merencanakan dan menyusun strategi aksi demonstrasi (Misbah, 2017). Serikat buruh, di sisi lain, umumnya diorganisir oleh serikat buruh atau federasi serikat buruh yang memiliki struktur organisasi hierarkis. Mereka memiliki pimpinan, pengurus, dan koordinator lapangan yang bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasikan aksi demonstrasi. Komunikasi antaranggota sering dilakukan melalui pertemuan rutin,

grup diskusi, dan media komunikasi internal serikat (Rachman, 2019). Kelompok masyarakat sipil, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas lokal, atau jaringan advokasi, mengatur aksi demonstrasi melalui rapat, diskusi, dan koordinasi antar anggota atau anggota jaringan. Beberapa kelompok dapat memiliki koordinator atau staf yang bertugas untuk mengorganisir aksi demonstrasi (Kusumawati, 2020). Kelompok agama, di lain pihak, biasanya diorganisir oleh tokoh agama, pemimpin gereja, atau ulama yang memiliki otoritas dalam komunitas agama. Mereka menggunakan seruan agama, ceramah, dan pertemuan keagamaan sebagai sarana untuk menggali dukungan dan mengorganisir anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi (Wibowo, 2018). Organisasi masyarakat adat sering diorganisir oleh pemimpin adat, tokoh masyarakat, atau perwakilan komunitas adat. Mereka menggunakan forum musyawarah adat, pertemuan komunitas, dan kegiatan budaya sebagai sarana untuk mengorganisir dan merencanakan aksi demonstrasi. Keputusan diambil secara konsensus dalam rapat adat atau forum komunitas (Sukiman, 2016). Kelompok seniman dan budayawan, terakhir, sering mengatur aksi demonstrasi melalui kolaborasi antarindividu atau organisasi seni dan budaya. Mereka menggunakan karya seni, pertunjukan, pameran, dan acara seni lainnya sebagai sarana untuk menyuarakan pesan-pesan politik dan sosial serta menggali dukungan untuk aksi demonstrasi (Utomo, 2021). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang cara organisasi dan koordinasi dari masing-masing kelompok demonstran dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika perjuangan mereka.

Mengorganisir berbagai kelompok atau elemen masyarakat untuk bersedia bergabung dalam sebuah demonstrasi bisa menjadi tugas yang sangat menantang. Perbedaan dalam nilai-nilai, tujuan, dan prioritas antara kelompok-kelompok tersebut dapat menyulitkan proses koordinasi. Misalnya, kelompok mahasiswa mungkin memiliki fokus yang berbeda dengan kelompok agama atau kelompok pekerja seni dalam hal tujuan dan strategi perjuangan. Menurut Misbah (2017), hal ini sering kali menjadi hambatan dalam upaya untuk mengorganisir demonstrasi karena dibutuhkan keselarasan antara tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap kelompok. Selain itu, adanya perbedaan pandangan atau strategi antara pemimpin atau tokoh dalam setiap kelompok juga dapat menyulitkan proses pengorganisasian.

Ketidaksepakatan atau konflik internal dalam kelompok dapat memperlambat atau bahkan menghalangi upaya untuk menggalang dukungan untuk demonstrasi. Rachman (2019) menyatakan bahwa faktor internal seperti ini sering kali menjadi kendala utama dalam mengkoordinasikan aksi demonstrasi. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan atau intimidasi dari pihak yang berkepentingan juga bisa menghambat partisipasi kelompok-kelompok tersebut dalam aksi demonstrasi. Beberapa kelompok mungkin menghadapi risiko yang lebih besar dalam terlibat dalam demonstrasi, terutama jika mereka berhadapan dengan ancaman atau tindakan represif dari pemerintah atau kelompok-kelompok lain. Menurut Utomo (2021), faktor-faktor eksternal seperti ini dapat mempengaruhi keputusan kelompok untuk berpartisipasi dalam demonstrasi.

Dengan demikian, meskipun terdapat keinginan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dan politik, mengorganisir berbagai kelompok atau elemen masyarakat untuk bersedia ikut serta dalam sebuah demonstrasi sering kali memerlukan upaya besar dalam mengatasi perbedaan dan tantangan yang ada. Salah satu upaya untuk mengatasi perbedaan dan tantangan tersebut adalah dengan membentuk organisasi atau gerakan yang bisa mencakup semua perbedaan visi misi yang terdapat pada keenam golongan tersebut, sehingga masing-masing tujuan dari setiap golongan akan tercapai. Salah satu contoh “organisasi politik” atau gerakan masyarakat yang aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adalah Gejayan Memanggil. Organisasi ini aktif berpartisipasi dalam demonstrasi dengan berbagai isu, dengan melibatkan enam kelompok demonstran yang telah dibahas sebelumnya.

Aliansi Rakyat Bergerak atau Gejayan Memanggil, awalnya dibentuk melalui aksi demonstrasi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta yang terjadi sejak 5 Mei 1998 (Adhari, 2021: 19). Dulu, kumpulan para mahasiswa ini diberi nama Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi (SOMASI). Mereka ikut andil untuk melawan Soeharto. Aksi ini dimulai di depan Universitas Sanata Dharma. Namun, sejak isu yang berkembang menjadi lebih pelik dan makin menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat, SOMASI berubah menjadi Aliansi Rakyat Bergerak atau Gejayan Memanggil.

Gejayan Memanggil merupakan “organisasi politik” yang aktif hingga saat ini membahas isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan organisasi Gejayan Memanggil disuarakan dengan kegiatan demonstrasi. Kegiatan demonstrasi yang dilakukan berjalan dengan baik karena direncanakan dan disusun dengan matang serta dijalankan dengan sedemikian rupa sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing anggota. Dalam hal ini pengorganisasian berperan penting dalam setiap aktivitas demonstrasi yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh Gejayan Memanggil. Penulis tertarik untuk mengangkat bagaimana pengorganisasian Gejayan Memanggil yang elemennya berisi mahasiswa, rakyat, dan lainnya, yang memiliki tujuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan menyebarkan narasi kepada sesama masyarakat sipil. Dengan menggali lebih dalam mengenai Gejayan Memanggil, pembagian tugas, fungsi, dan keterlibatan massa demonstrasi, penulis ingin mengetahui bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh Gejayan Memanggil dalam kegiatan demonstrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengurus Gejayan Memanggil melakukan pengorganisasian untuk kegiatan demonstrasi di Yogyakarta?”

1.3. Kajian Pustaka

Pertama, tulisan skripsi yang milik oleh Bintang Aji Putra (2022) dengan judul *Pengorganisasian Program Pencegahan Perdagangan Orang Pada Mitra Wacana Women Resource Center*. Dalam pelaksanaan program pencegahan perdagangan orang, organisasi Mitra Wacana Women Resource Center menggunakan struktur tim pelaksana yang bertujuan agar setiap program dapat berjalan lancar. Pimpinan teratas dalam Program Pencegahan Perdagangan Orang Pada Mitra Wacana Women Resource Center adalah manager program. Pelaksanaan program tersebut dibantu oleh struktur yang memiliki peran untuk mengorganisir program secara operasional. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Mitra Wacana Women Resource Center menggunakan empat tahapan, yaitu Perencanaan, Implementasi,

Monitoring, dan Evaluasi atau disebut dengan system PIME yang mana proses pada setiap tahapan tersebut mencirikan proses sosial yang kolektif dan egaliter.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama menggunakan teori Pengorganisasian. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah terdapat pada subjek penelitian dan ruang lingkup penelitian, yang mana penelitian ini memiliki subjek dan ruang lingkup penelitian pada Mitra Wacana Women Resource Center, sedangkan penelitian penulis memiliki subjek dan ruang lingkup penelitian pada organisasi Gejayan Memanggil. Manfaat penelitian sebelumnya untuk penelitian penulis adalah penulis merasa terbantu dalam teori yang memperkaya pandangan penulis.

Kedua, artikel dalam jurnal ilmiah karya Ishlahul Ummah (2018) dengan judul *Pengorganisasian Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air di Dusun Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek*. Penelitian tersebut mendapatkan hasil adanya pengorganisasian masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air muncul dalam bentuk lembaga swadaya air.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama menggunakan teori Pengorganisasian. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah terdapat pada subjek dan ruang lingkup penelitian pada masyarakat Dusun Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, sedangkan penelitian penulis memiliki subjek penelitian dan ruang lingkup penelitian pada organisasi Gejayan Memanggil. Manfaat penelitian sebelumnya untuk penelitian penulis adalah penulis merasa terbantu dalam teori dan rumusan masalah, yang memperkaya pandangan penulis.

Ketiga, tulisan skripsi oleh Titin Marliyana (2020) dengan judul *Pengorganisasian Kelompok Tani Dalam Memperjuangkan Perhutanan Sosial (Studi Kasus Pengorganisasian Stam di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)*. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengorganisasian dilakukan untuk melawan ketidakberdayaan petani guna menciptakan perubahan agar petani mampu beradaptasi menghadapi permasalahannya. Pengorganisasian

dilakukan karena adanya persoalan dan potensi penyelesaian, intervensi ke arah perubahan, dan pihak yang terlibat dalam intervensi. Dalam melakukan pengorganisasian, serikat tani mandiri (STAM) mempertimbangkan prinsip pengorganisasian, bentuk model dan media pengorganisasian, dan langkah-langkah maupun tahapan pengorganisasian.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terdapat pada subjek dan ruang lingkup penelitian. Subjek dan ruang lingkup penelitian sebelumnya adalah pada Kelompok Tani Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian penulis memiliki subjek dan ruang lingkup pada organisasi Gejayan Memanggil. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah pada teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teori gerakan sosial, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori pengorganisasian.

Manfaat penelitian sebelumnya untuk penelitian penulis adalah penulis merasa terbantu dalam hal rumusan masalah, metode penelitian dan juga teori yang digunakan, yang berguna memperkaya pandangan penulis pada penelitian ini.

Keempat, tulisan skripsi oleh Siti Zulaichah (2016) dengan judul *Pengorganisasian Kegiatan Pondok Pesantren Nurudzolam Di Dusun Jomblang, Wanahasa, Banjarnegara*. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penerapan pengorganisasian di Pondok Pesantren Nurudzolam saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan ini dapat dilihat dari keenam aspek pengorganisasian yaitu pembagian kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi yang mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan teori pengorganisasian dan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah terdapat pada subjek penelitian dan ruang lingkup penelitian, yang mana penelitian ini memiliki subjek dan ruang lingkup penelitian pada Pondok Pesantren

Nurudzolam Di Dusun Jomblang, Wanahasa, Banjarnegara, sedangkan penelitian penulis memiliki subjek dan ruang lingkup penelitian pada organisasi Gerakan Gejayan Memanggil. Manfaat penelitian sebelumnya untuk penelitian penulis adalah penulis merasa terbantu dalam teori yang memperkaya pandangan penulis.

1.4. Kerangka Konseptual

1.4.1. Organisasi

Menurut Handyaningrat (1985: 42), organisasi adalah wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan tersebut, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Menurut Handyaningrat (1985:3), organisasi mempunyai beberapa tiga konsep dasar:

1. Adanya anggota

Organisasi terdiri dari minimal dua orang atau lebih, yang merupakan individu-individu dengan kepribadian dan sifat yang beragam. Sebagai makhluk sosial dan individu, setiap orang memiliki kompleksitas masing-masing. Karena itu, dinamika yang muncul dalam organisasi, baik berdampak positif maupun negatif, adalah hal yang wajar mengingat kehadiran berbagai individu di dalamnya.

2. Bekerja sama

Setelah bergabung dalam organisasi, setiap anggota diharapkan dapat bekerja sama. Dalam kerja sama ini, meskipun pembagian tugas dan tanggung jawab dibagi secara berbeda, kerja sama antar anggota organisasi mutlak diperlukan pembagian tugas dan kerja bisa berbeda-beda tetapi harus bisa bekerja sama

3. Mencapai tujuan bersama

Organisasi dibentuk oleh kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Tujuan ini menjadi komitmen yang menyatukan seluruh anggota, meskipun anggota mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda, tugas dan peranannya juga berbeda. Tujuan ini sebagai pengikat anggota organisasi dalam melakukan kerjasama.

Menurut Handyaningrat (1980: 49), terdapat bentuk-bentuk organisasi yang terdiri dari:

1. Organisasi Lini atau garis

Organisasi ini mempunyai bentuk sederhana dan sering digunakan dalam organisasi militer. Dalam organisasi ini, bawahan hanya memiliki satu

atasan/pimpinan sebagai sumber kewenangan yang memberikan perintah atau instruksi. Peran bawahan terbatas sebagai pelaksana, meskipun tidak semua pelaksana secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan utama organisasi.

2. Organisasi Lini atau Garis dan Staf

Organisasi lini dan staf biasanya digunakan dalam organisasi pemerintahan. Struktur ini terdiri dari unit lini/garis dan unit staf. Unit lini adalah individu atau kelompok yang terlibat secara langsung ikut serta dalam melaksanakan tercapainya tugas utama organisasi. Sedangkan unit staf bertugas memberikan dukungan tidak langsung, seperti menyediakan bantuan di bidang kepegawaian, keuangan, material, dan bantuan lainnya baik untuk kepentingan unit staf sendiri maupun unit lini (Handayani, 1980: 49).

3. Organisasi Fungsi

Organisasi fungsi ini pada umumnya terdapat pada organisasi niaga. Struktur ini dibangun berdasarkan fungsi-fungsi yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, di mana setiap fungsi/kepentingan seolah-olah terpisah berdasarkan atas bidang keahlian masing-masing. Meskipun setiap fungsi sekalipun tidak dapat berdiri sendiri, karena fungsi satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Agar dapat berhasilnya organisasi fungsi ini, maka masalah koordinasi dan kerjasama, menjadi sangat penting. Sekalipun dalam organisasi ini melibatkan tenaga staf ahli, tanggung jawab utama tetap pada para pejabat pelaksana utama.

4. Organisasi Panitia

Panitia adalah sekelompok orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus, yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seseorang atau sebuah dewan (banyak orang). Selain panitia, terdapat istilah lain yaitu yang disebut Gugus Tugas. Gugus Tugas ialah kelompok sementara yang terdiri daripada orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, yang diambil atau ditunjuk dari berbagai unit organisasi atau instansi, yang bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu. Apabila tugas tertentu ini sudah selesai maka Gugus Tugas ini dibubarkan (Jaelani, 2021, p.46-49).

1.4.2. Pengorganisasian

Menurut Hasibuan (2007), pengorganisasian merupakan proses menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk

mencapai tujuan. Proses ini melibatkan penempatan individu pada setiap aktivitas, penyediaan alat-alat yang diperlukan, serta penetapan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktivitas tersebut. Sementara itu, menurut Hold (1993), pengorganisasian adalah fungsi yang meliputi pengumpulan data, pengumpulan sumber daya, pengalokasian sumber daya, dan penyusunan tugas untuk memenuhi rencana organisasi (Winardi, 2017, p.20). Proses ini dapat dipahami melalui struktur yang terbentuk dalam organisasi. Pembentukan struktur organisasi dikenal pula sebagai proses pengorganisasian, yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang saling terintegrasi sehingga memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain.

Menurut Saul W. Gellerman yang dikutip oleh Samuel Certo (1994) (dalam Winardi, 2019, p.24), ada lima langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu:

1. Melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran

Melaksanakan refleksi tentang rencana dan sasaran adalah melakukan refleksi atau peninjauan kembali terhadap strategi, tujuan, dan sasaran yang akan direncanakan dalam organisasi.

2. Menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi

Menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi merujuk pada proses yang terdiri dari identifikasi, penentuan, dan alokasi peran serta tanggung jawab yang spesifik kepada setiap anggota dalam suatu organisasi.

3. Melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci

Melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci adalah proses pembagian lebih lanjut menjadi tugas-tugas bagian yang lebih kecil dan spesifik

4. Mengalokasikan sumber daya yang tersedia

Mengalokasikan sumber daya yang tersedia adalah proses mengalokasikan sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, keuangan, waktu, dan fasilitas kepada setiap tugas dan bagian

5. Melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan.

1.4.3. Demonstrasi

Demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Pasal 5 Tahun 1998 adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepingankelompok. Menurut Gazali Rahman (2021), demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok lainnya dengan tujuan berbeda. Demonstrasi kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung.

Demonstrasi dikenal sebagai satu bentuk partisipasi politik. Gabriel Almond mengkategorikan demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik non konvensional, bentuk partisipasi politik berwujud demonstrasi, protes, dan tindak kekerasan dipergunakan oleh orang untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijakan pemerintah, apabila bentuk-bentuk aktivitas lain tidak dapat dilakukan atau nampak tidak efektif (Almond, 1990, p.46-47).

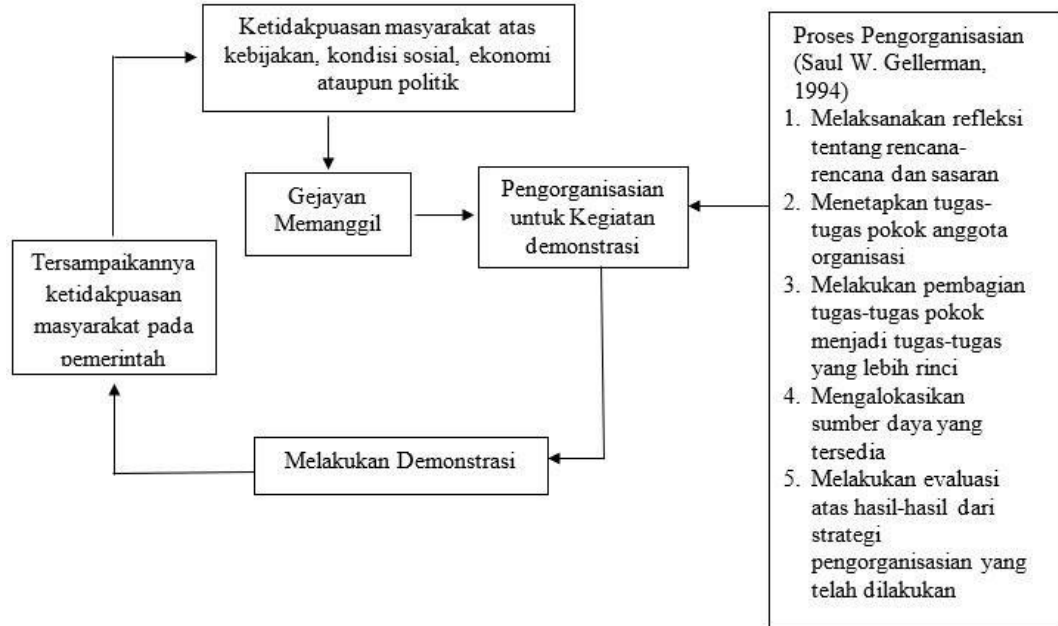
Demonstrasi merupakan aktualisasi politik yang dilakukan dalam praktik politik di negara demokratis. Demonstrasi sebagai satu bentuk ekspresi politik masyarakat semestinya diterima dan diakomodasikan dalam proses politik dan pemerintahan (Fatah, 1994, p.3-6).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep pengorganisasian menurut pendapat Saul W. Gellerman yang dikutip oleh Certo (1994) (dalam Winardi, 2019, p.24), yang meliputi lima langkah proses pengorganisasian, yaitu 1) melaksanakan refleksi tentang penetapan rencana dan sasaran, 2) menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, 3) melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, 4) mengalokasikan sumber daya yang tersedia, dan 5) melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Penelitian ini akan berfokus untuk mengidentifikasi bagaimana kelima proses pengorganisasian dapat dimanfaatkan oleh pengurus Gejayan Memanggil dalam melakukan pengorganisasian untuk kegiatan demonstrasi.

1.5. Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka berpikir yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini:

Gambar 1 : Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Penulis, 2024

Ketidakpuasan atau ketidakadilan sering muncul dari kebijakan yang tidak adil, kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kegagalan implementasi kebijakan. Ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat mendorong masyarakat untuk melakukan penyampaian aspirasinya di muka umum. Organisasi Gejayan Memanggil menjadi wadah bagi anggota masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Gejayan Memanggil aktif berpartisipasi dalam demonstrasi dengan berbagai isu dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, serikat buruh, masyarakat sipil, kelompok agama, masyarakat adat, dan seniman atau budayawan yang mana mereka ikut berperan aktif dalam pelaksanaan demonstrasi. Dalam tujuannya untuk melakukan demonstrasi, Gejayan Memanggil perlu melakukan pengorganisasian yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengurus Gejayan Memanggil melakukan pengorganisasian untuk kegiatan demonstrasi. Penelitian ini akan menggunakan konsep proses pengorganisasian menurut Saul W. Gellerman (1994) yang meliputi

lima tahapan sebagai berikut: (1) Melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran, (2) Menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, (3) Melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci (4) Mengalokasikan sumber daya yang tersedia, (5) Melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Setelah dilakukan pengorganisasian, dilaksanakanlah demonstrasi. Demonstrasi menjadi salah satu langkah untuk menyuarakan ketidakpuasan dan ketidakadilan tersebut dan sebagai salah satu wadah atau media dalam menyuarakan ketidakpuasan dan ketidakadilan masyarakat kepada pemerintah.

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana pengurus Gejayan Memanggil melakukan pengorganisasian untuk kegiatan demonstrasi di Yogyakarta”.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

1. BAB I, adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka konseptual, kerangka berpikir, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II, adalah Metodologi Penelitian yang berisi jenis penelitian, metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi objek atau subjek penelitian.
3. BAB III, adalah Temuan dan Pembahasan yang berisi penjelasan hasil temuan dari proses pengumpulan data dan pembahasan.
4. BAB IV, adalah Kesimpulan yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian.